

Jokowi Berkunjung ke Kenya, Tanzania, Mozambik dan Afsel

JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat ke Afrika pada Minggu (20/8). Kunjungan Jokowi ke Afrika ini merupakan yang pertama kalinya sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (RI).

Jokowi mengaku akan mengunjungi empat negara sekaligus yakni, Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan.

“Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan bertolak menuju ke Afrika. Kami akan berkunjung ke empat negara yaitu Kenya, Tanzania, Mozambik dan Afrika Selatan dan ini merupakan kunjungan pertama saya sebagai Presiden ke kawasan Afrika,” kata Jokowi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (20/8).

Jokowi menyebut kunjungan perdananya ke kawasan Afrika dalam rangka untuk memperkokoh solidaritas di antara negara-negara selatan global.

Kepala negara akan bertolak ke Afrika melalui Bandara

Internasional Kualanam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Spirit ‘Bandung’ inilah yang akan saya bawa dalam kunjungan ke Afrika dengan memperkokoh solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara the global south,” ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, Indonesia dan Afrika memiliki sejarah yang panjang, yang terlihat dalam sejumlah momentum besar dalam perjalanannya.

“Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di tahun 1955. Indonesia juga berperan penting dalam melahirkan Gerakan Non-Blok saat itu,” jelasnya.

Adapun, negara pertama yang akan dikunjungi oleh Presiden dalam kunjungannya yakni Republik Kenya.

Kemudian ke Republik Mozambik. Negara yang terakhir dikunjungi Jokowi adalah Afrika Selatan. ● **mei**

Kantor Staf Presiden Soroti Minimnya Prajurit TNI Perempuan

JAKARTA (IM) - Kantor Staf Presiden (KSP) sebut keterlibatan kaum perempuan di TNI belum optimal. Hal itu diungkapkan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani saat diskusi sejarah yang digelar dari atas KRI Banda Aceh-593 di Dermaga Kolinlamil, Jakarta Utara, Jumat (18/8).

“Kita harus mengakui keterlibatan dan peran perempuan dalam institusi TNI masih belum optimal,” kata Jaleswari.

Berdasarkan catatan KSP, sebanyak 444.133 prajurit TNI pada 2022, tetapi hanya ada 8.850 personel perempuan.

“Di mana sekitar 3.000 dari jumlah itu tergabung dalam Korps Wanita TNI AL (Kowal),” tutur Jaleswari.

“Artinya, secara agregat, baru sekitar 2 persen personel TNI bergender perempuan,” katanya.

Jaleswari menyebutkan, sosok Laksamana Malahayati bisa menjadi inspirasi perempuan di bidang militer.

“Laksamana Malahayati membuktikan perempuan dapat menjadi pemimpin yang kuat dan efektif, bahkan dalam bidang militer yang secara tradisional didominasi oleh kawan laki-laki,” katanya.

TNI Angkatan Laut sendiri juga memela-

jari sejarah Laksamana Malahayati guna membangun kekuatan postur untuk beberapa tahun ke depan.

Kepala Staf TNI AL (KSAI) Laksamana Muhammad Ali mengatakan, Laksamana Malahayati memiliki reputasi yang tidak terbantahkan dalam sejarah maritim Indonesia. Ali menyebutkan, Malahayati yang bernama asli Keumalahayati, lahir dan dibesarkan di tengah budaya Aceh yang kental dengan tradisi maritim.

Dikutip dari siaran pers Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal), Laksamana Malahayati terlibat dalam sejumlah pertempuran laut dan ekspedisi militer skala besar.

Ia memimpin Laskar Inong Balee mengalahkan kapal Belanda dan membunuh Komandan Kapal Cornelis de Houtman pada 1599.

Laksamana Malahayati juga seorang diplomat yang andal dalam menjalin kerja sama dengan Kerajaan Inggris dan Turkiye untuk kepentingan Aceh pada masa itu. Selain itu, ia juga mampu membendung pengaruh Spanyol, Portugis, dan Belanda di Selat Malaka. ● **mei**

Beli Jabatan, Tiga Mantan Pejabat Kabupaten Pemalang Segera Diadili

JAKARTA (IM) – Beberapa mantan kepala dinas (Kadis) dan kepala badan di Pemerintah Kabupaten Pemalang akan diadili. Mereka diduga menyuap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo untuk mendapatkan jabatan.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, mantan pejabat Pemkab Pemalang yang akan diadili adalah Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Rachman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Suhirman, serta mantan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Mubarak Ahmad. Mereka akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

“Kasatgas Penuntutan Ikhsan Fernandi telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan,” ujar Ali

kepada wartawan, Minggu (20/8).

Saat ini, kata Ali, status penahanan para terdakwa sudah beralih ke Pengadilan Tipikor. Meski demikian, mereka tetap mendekam di rumah tahanan (Rutan) KPK. Jaksa KPK masih menunggu Panitera Muda Pengadilan Tipikor Semarang menerbitkan jadwal sidang perdana.

“Untuk pembacaan surat dakwaan,” ujar Ali.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 13 tersangka dugaan suap jual beli jabatan. Suap berkisar antara Rp 15 hingga Rp 100 juta. Mereka adalah Mukti Agung Wibowo dan orang kepercayaan, Adi Jumal Widodo sebagai penerima suap.

Kemudian, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) pemalang Slamet Masduki, Kepala BPBD Pemalang Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuaris Nitbani, dan Mohamad Saleh. Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Rachman, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Mubarak Ahmad, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Suhirman, dan Sekretaris DPRD Sodik Ismanto. ● **han**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



GERNAS BBI KALTARA Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang (tengah) didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo Usman Kansong (kedua kanan) mengunjungi stan UMKM Gerakan Nasional (Gernas) Bangsa Buatan Indonesia (BBI) dan Bangsa Berwisata di Indonesia (BBWI) 2023 di Lanud Anang Busra, Tarakan, Kalimantan Utara, Minggu (20/8). Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sejak peluncuran Gernas BBI pada 2020 sebanyak 22,68 juta unit UMKM berhasil melakukan onboarding ke ekosistem digital per Juni 2023.

Cak Imin Dinilai Tingkatkan Daya Tawar terhadap Prabowo dengan Temui Ganjar

Cak Imin bertemu Ganjar dinilai sebagai strategi perimbangan untuk meng-counter balik manuver Erick Tohir yang seolah dapat karpet merah di KKIR.

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Khoiril Umam menilai bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, tengah meningkatkan daya tawar atau bargaining position terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan menemui Ganjar Pranowo, calon presiden yang akan diusung PDIP.

Ganjar dan Cak Imin melakukan bertemu di salah satu kafe yang terletak di ka-

wasan Jakarta Selatan, Jumat (18/8). Keduanya sama-sama mengenakan baju putih.

“Pertemuan Cak Imin dan Ganjar Pranowo kemarin merupakan langkah PKB untuk meningkatkan daya tawar di hadapan Prabowo dan Gerindra,” kata Khoiril Umam kepada wartawan, Minggu (20/8).

Seperti diketahui Ganjar Pranowo belum memutuskan siapa bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan mendampingi di Pilpres 2024. Nama Cak Imin disebut masuk ke dalam

salah satu radar bacawapres Ganjar.

Di sisi lain, PKB telah menjalin kerja sama politik dengan Gerindra. Namun, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang dibentuk kedua parpol itu sejak setahun terakhir, belum juga memutuskan siapa pasangan cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto.

Kini, jumlah parpol yang mengisi KKIR kian besar, setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar bergabung ke dalam koalisi. PAN menawarkan nama Erick Tohir sebagai bacawapres pendamping Menteri Pertahanan (Menhau) itu.

“Langkah itu (pertemuan Ganjar-Cak Imin) merupakan strategi perimbangan untuk meng-counter balik manu-

ver Erick Tohir yang seolah mendapatkan karpet merah di KKIR,” papar Khoiril Umam.

Menurut Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina ini, secara etika politik, seharusnya Cak Imin yang berhak menjadi Cawapres pendamping Prabowo. Sebab, Ketua Umum PKB itu sejak awal mengantre dan telah aktif menghidupkan KKIR sehingga wacana pencaprahan Prabowo Subianto.

Jika saat ini PAN dan Golkar masuk, kemudian skema

pengambilan keputusan politik di KKIR dibuat setara di antara semua partai, jelas PKB yang dirugikan. Pasalnya, masuknya Golkar dan PAN setelah satu tahun KKIR berdiri seolah membuat PKB ditikam oleh kawan seirang.

“Karena itu, pertemuan Cak Imin dengan Ganjar merupakan langkah awal untuk lompat koalisi, sebagai bagian dari awal evaluasi total jika Prabowo melanggar ‘sumpah prajurit’ yang pernah ia janjikan kepada Cak Imin dan PKB,” kata Khoiril Umam. ● **han**

Enam Calon Deputi Penindakan KPK Dinyatakan Lolos Tahap Penulisan Makalah

JAKARTA (IM) - Sebanyak enam peserta calon Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos tahap seleksi penulisan makalah. Selanjutnya, mereka akan menjalani tahapan seleksi berikutnya yakni, asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural.

“Bagi para peserta yang telah dinyatakan lolos pada tahapan seleksi ini, wajib mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yaitu asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Minggu (20/8).

Adapun, enam calon Deputi Penindakan KPK yang lolos tahap seleksi penulisan makalah yakni, Staf Ahli Sosial Politik (Sahlisospol) Kapolri, Irjen Pol Rudi Setiawan; Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kepri), Rudi Margono; Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdijanto Sudjadi.

Kemudian, Staf Khusus Bidang Keselamatan Publik Ibu Kota Nusantara (IKN) Brigjen Pol Edgar Diponegoro; Kepala Biro Kerja Sama dan Penyuluhan Hukum (Karokerm-aluhkum) Divisi Hukum Polri Brigjen Pol Rakhmad Setyadi; serta Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama.

Selain itu, sebanyak enam calon Deputi Bidang Informasi dan Data KPK juga lolos seleksi tahap penulisan makalah. Mereka yakni, Eko Marjono dari KPK; Ade Komara Mulyana dari Badan Informasi Geospasial; Iwan Herniawan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya, R Dian Muhammad Johan Johor Mulyadi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Bastian dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

serta Yusran Lapangan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Sementara itu, terdapat juga lima calon Deputi Penuntutan KPK asal Kejaksaan RI yang lolos seleksi tahap penulisan makalah. Mereka yakni, Yudi Kristiana; Bima Suprayoga; Irene Putri; Eri Satriana; dan Diah Yulianti.

Sedangkan untuk posisi Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, ada enam calon yang lolos seleksi tahap penulisan makalah yakni, Edi Suryanto; Niken Ariati; Rini Triningisih; Tessa Marhadhika Sugianto; Imam Turmudhi serta David Hartono Hutaauruk.

Sehingga, total ada 23 peserta yang lolos seleksi tahap penulisan makalah dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama di lingkungan KPK Tahun 2023. Para peserta yang lolos selanjutnya akan seleksi asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural.

“Sejumlah 23 peserta lolos tahapan ini dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu pada Jabatan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi sejumlah 6 peserta; Deputi Bidang Informasi dan Data sejumlah 6 peserta; Direktur Penuntutan sejumlah 5 peserta; serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I sejumlah 6 peserta,” jelas Ali.

Ali menambahkan, seleksi bagi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dijadwalkan pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 2023.

Kemudian, bagi peserta Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada tanggal 22 sampai 24 Agustus 2023. “Asesmen dilaksanakan di Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujarnya. ● **han**

KASUS PENGANIAYAAN TERHADAP DAVID OZORA

AG Tak Dibebani Bayar Restitusi Rp120 Miliar Seperti Mario Dandy

JAKARTA (IM) - Jaksa penuntut umum (JPU) tidak menuntun menuntun anak AG (15) membayar restitusi kepada korban Cristalino David Ozora (17).

Padahal sebelumnya jaksa menuntut terdakwa Mario Dandy Satriyo (20) dan Shane Lukas Rotua Pangondian (19) untuk membayar restitusi atau ganti rugi sebesar Rp 120 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana pada Jumat (18/8) menjelaskan, AG tidak dibebankan membayar restitusi ke korban karena masih anak-anak.

“AG tidak (dituntut) membayar restitusi karena dia masih anak-anak,” kata Ketut. Kendati demikian, da-

lam tuntutan jaksa, dicantumkan anak AG juga dituntut membayar restitusi Rp 120 miliar. Lalu apa penjelasan Ketut?

Ketut mengatakan anak AG memang dicantumkan dalam tuntutan restitusi terhadap Mario Dandy dan Shane Lukas.

Hal itu karena, kata Ketut, AG bersama-sama Mario Dandy dan Shane Lukas menyebabkan kerugian pada David akibat penganiayaan.

“Restitusi juga kita tidak bebaskan sama mereka lagi. Cuma di sana akan kita cantumkan dia secara bersama-sama menyebabkan suatu kerugian,” kata Ketut.

Jaksa juga menuntut agar Mario Dandy dan dua terda-

kwa lain, Shane Lukas serta AG (15), membayar restitusi atau ganti rugi terhadap David sebesar Rp 120 miliar.

“Membebankan terdakwa Mario Dandy, saksi Shane Lukas dan anak saksi AG masing-masing dalam berkas terpisah, bersama-sama secara berimbang menyesuaikan peran serta untuk membayar restitusi kepada David Rp 120.388.911.030 (Rp 120 miliar),” ujar jaksa dalam persidangan di PN Jaksel, Selasa (15/8).

Jaksa mengatakan restitusi akan diganti hukuman 7 tahun penjara jika Mario Dandy tidak bisa membayarnya.

“Jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun,” ucap jaksa. ● **han**



FOTO: ANTARA

PENGUMPULAN DATA DI AREA TEMUAN ODCB KROPAKAN

Mahasiswa Arkeologi Universitas Gajah Mada (UGM) mengukur batu yoni di Kropakan, Mranggen, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Minggu (20/8). Selain mengumpulkan data berbagai temuan fragmen ODCB dan sumur kuno, kegiatan yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama mahasiswa Arkeologi UGM dan Geografi UGM itu juga mengumpulkan data sampel tanah untuk melengkapi temuan objek diduga cagar budaya pada masa Mataram Kuno.

PENGUMUMAN

Dengan akta tgl 19-8-2023 No. 6 dibuat di hadapan MUHAMMAD NAHI MUNGKAR, SH., Notaris di Jakarta Barat. PT. JAMES KING CONCEPTS, berkedudukan di Jakarta Utara, telah menaikan modal dasar dan modal disetor DARI modal dasar Rp.2.501.000.000 modal disetor Rp.2.501.000.000 MENJADI modal dasar Rp.50.000.000 modal disetor Rp.13.000.000.

Dalam waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, Kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.